

ABSTRAK

Tujuan penulisan naskah ini yaitu pertama. Untuk mengetahui seperti apa pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dihubungkan dengan kredit fiktif berdasarkan Undang-undang yang sudah ditentukan tentang pertanggung jawaban tindak pidana korupsi. Kedua, untuk menganalisis Kebijakan Bank BNI terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi kredit fiktif. Ketiga, guna melakukan analisis pertimbangan Hakim untuk membuat putusan terhadap terdakwa pelaku Tindak pidana korupsi kredit fiktif dalam Putusan Mahkamah Agung, No 1590 K/Pid. Sus/2015. Metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis yaitu Dalam perspektif filsafat hukum akan dikaji mengenai nilai-nilai yang memengaruhi perilaku dari pelaku tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan digunakan penelitian hukum normatif menemukan kebenaran koherensi dalam penelaahan hukum secara prinsip yang ada baik secara hukum tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan tiga rumusan masalah dapat disimpulkan. Pertama, bagaimana pertanggung jawaban tindak pidana korupsi kredit fiktif tersebut yang dilakukan oleh pelaku. Kedua, Bagaimanakah kebijakan BNI terhadap terdakwa yang melakukan korupsi kredit fiktif yang dilakukan pelaku. Ketiga, Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan (putusan MA No. 1590K/pid.sus/2015).

Kata Kunci: pertanggung jawaban, tindak pidana, korupsi, kredit fiktif.

ABSTRACT

The purpose of this manuscript is first. To find out what is related to criminal answers to criminal acts of corruption that serve with fictitious credit based on the Law that stipulates answers to criminal acts of corruption. Second, to analyze Bank BNI's policies on fictitious corruption crimes. Third, to analyze the Judge's consideration to make a verdict on the accused of fictitious credit corruption in the Supreme Court Decision, No. 1590 K / Pid. Sus / 2015. The research method used by the author is in the perspective of legal philosophy, the values that influence the behavior of corruption crimes that are detrimental to state finances are used and normative legal research is used to find the truth of coherence in legal review, in principle, both legally written or unwritten. Based on the research results, based on the three problem formulations it can be rejected. First, what is the accountability of the fictitious credit corruption crime committed by the perpetrator. Second, what is the BNI policy towards the accused who has committed fictitious credit corruption by the perpetrator. Third, what are the judges' considerations in imposing (Supreme Court decision No. 1590K / pid.sus / 2015). Fictitious criminal acts of corruption must be carried out in accordance with the applicable legal provisions.

Keywords: liability, criminal acts, corruption, fictitious credit.